

BAB V

HUBUNGAN SOSIAL MIGRAN MUSLIM DAN PENGUATAN IDENTITAS DI TANAH PAPUA

Bab ini akan mendiskusikan hal yang terkait dengan hubungan Migran Muslim dengan masyarakat Orang Asli Papua dan bagaimana mereka menguatkan posisi di mata Orang Asli Papua. Otonomi khusus Papua telah menguatkan posisi Orang Asli Papua sebagai kelompok yang dominan dalam segala aspek. Pembahasan ini diawali dengan kajian tentang migrasi non Papua ke hampir semua wilayah Papua termasuk Kabupaten Jayapura. Dari keberadaan mereka selama di Papua sampai dengan diberlakukannya Otonomi khusus Papua melahirkan berbagai dampak sosial yang mengharuskan mereka berstrategi agar tetap eksis, meskipun banyak tekanan. Hubungan-hubungan yang terjadi antara kedua belah pihak (Migran-Papua) kemudian melahirkan dinamika yang bercorak kontestatif-adaptif. Beradaptasi dengan keadaan yang ada dalam merespon kebijakan Otonomi sambil melakukan penguatan identitas dengan mendirikan dan atau bergabung ke dalam organisasi keagamaan atau organisasi yang bersifat kedaerahan untuk memperkuat *linkage*. Demikian pula mendirikan lembaga atau yayasan pendidikan sebagai wadah untuk memperkuat sumber manusia Migran Muslim meskipun yayasan atau lembaga yang dibentuk juga memberi kontribusi terhadap masyarakat lokal Papua.

5.1 Migrasi dan Dampak Sosial

5.1.1. Migrasi Etnis Non Papua

Konsep diaspora yang dikemukakan tiga hal oleh Cohen sebagaimana dikutip oleh Irwan Abdullah (2002) tentang “rumah”, “tempat”, dan “kewargaan”. Konsep rumah sebagai simbol dari kondisi perasaan yang selalu merasa rindu dan teringat oleh rumah di kampung halaman yang ditinggal yang

rasanya jauh di negeri orang. Demikian pula tempat adalah dianggap sebagai hal untuk memperlihatkan status sosial dan ekonomi seseorang bagaimana kualitas hidup mereka di tempat tujuan migrasi. Sementara kewargaan terkait dengan aspek politik dimana status hukum mereka di daerah tujuan yang selama ini mereka berada. Tiga hal tersebut di atas ini yang juga menggambarkan wajah dari para Migran Muslim yang datang ke Papua.

Perubahan pembangunan selama ini di Papua dan khususnya di Kabupaten Jayapura banyak dipengaruhi oleh kaum migran. Peran mereka selama ini mewarnai banyak aspek kehidupan di Papua khususnya dalam aspek pencatatan ekonomi lokal Papua. Kaum migran di sini adalah para orang-orang yang melakukan perpindahan ke Papua dengan sifat sukarela dengan tujuan menetap dan telah menjadi warga dari suatu wilayah provinsi atau mereka para pendatang yang telah lahir di Papua dan juga sudah menjadi warga Papua. Menurut Asyhari, migrasi itu terjadi karena motif perdagangan atau ekonomi, kekuasaan atau pemerintahan dan karena faktor politik (Asyhari dkk, 2015: 14), tetapi juga dimungkinkan karena faktor sosial.

Kehadiran orang-orang dari luar Papua tidak lepas dari posisi Papua sebagai wilayah yang strategis. Menurut Daud Yoesoef, Papua adalah “Jantung Indonesia” dengan beberapa alasan; geopolitik, geomorfologi dan geoekonomi serta geothologi (Wally, 2018:16-17). Secara geopolitik, posisi Papua baik secara geografis maupun geostrategik berada pada “Posisi Silang Dunia” diantara empat benua dan dua samudra yang membuat wilayah ini berada di pusat lintasan dunia yang membuat banyak bangsa ingin menguasai dunia. Jenderal legendaris Douglas MacArthur, dapat memenangkan Perang Dunia II di Asia Pasifik, dengan memilih Sentani, Kabupaten Jayapura sebagai basis kendali strategi perang saat itu. Demikian pula Presiden Soekarno, dengan kecerdasan pikirannya mampu melihat arti pentingnya Papua bagi masa depan Indonesia. Kedua, secara geomorfologi, pulau Papua merupakan pulau terluas

nomor dua di dunia setelah pulau Greenland, memiliki hutan luas sebagai penyumbang oksigen nomor dua setelah hutan amazon, serta morfologi yang sangat variatif, mulai dari kawasan dataran rendah hingga pegunungan yang menjulang tinggi bersalju. Sementara secara geoekonomi, Papua memiliki sumber daya kekayaan alam luar biasa maupun sumber daya manusia yang terentang dari zaman batu hingga era modern. Ketiga, secara geothelologi, sejak dahulu telah banyak orang datang sebagai musafir dan pedagang silih berganti dan membawa misi khobar injil dan misi dakwah Islamiyah dengan harapan setelah Papua diselamatkan, membawa manfaat bagi dirinya dan bangsa-bangsa lain.

Bila melihat ke belakang sebelum kemerdekaan, menurut catatan sejarah hubungan Papua (Raja Ampat) masuk dalam wilayah kerjaan Tidore (Arnold, 1995:402-404) dan catatan bahwa Papua berhubungan dengan Maluku pada abad XV. Dua informasi tersebut belum didapatkan kapan persisnya hubungan itu terjadi, namun yang ada hanya ditemukan sebuah catatan bahwa diawal abad XVI para sultan di Ternate dan Tidore saling bersaing dalam berebut pengaruh atas wilayah Raja Ampat (Athwa, 2004:43-46). Hubungan aspek politik pemerintahan ini kemudian melahirkan hubungan ekonomi, sosial dan agama sehingga terjadi proses migrasi antara keduanya.

Migrasi ke Papua juga terjadi kemudian ketika masa kolonialisasi Hindia Belanda di Papua (Hollandia/Jayapura dan Manokwari). Kolonial banyak mengambil tenaga administrasi dari Maluku, Key dan Manado (Meteray, 2012: 25-26). Mungkin alasannya ketertarikan orang-orang yang bermigrasi tersebut karena ada faktor-faktor kesamaan agama. Isu utama di masa ini, selain dari kekuasaan politik adalah masalah zending dan pendidikan (Asyhari dkk, 2015: 16), yang membedakan dengan proses migrasi sebelumnya yaitu perdagangan dan penyebaran Islam di wilayah bagian barat Papua (Athwa, 2004: 40). Penyebaran Islam hanya merupakan kosekuensi dari paham teologi yang dianut oleh siapa pun penganut agama tertentu yang

melakukan migrasi untuk tetap mengamalkan teologi yang dianutnya dimanapun ia berada sampai mereka dan berdiaspora ke berbagai wilayah yang ada sekitarnya.

Proses migrasi kemudian terjadi lebih massif setelah pelaksanaan proyek transmigrasi dan pengiriman para tenaga guru, dan tenaga PNS, dan lainnya yang ditugaskan untuk mempercepat pembangunan Papua. Hal ini searah dengan pendekatan strategi pembangunan ekonomi orde baru dengan membuka kawasan-kawasan baru di Papua. Program transmigrasi dimulai pada tahun 1964 sejak masa pemerintahan orde baru. Mereka berasal dari Jawa, Sulawesi, Maluku, Sumatera, Kalimantan (Wanggay, 2009: 143); Ismail dan Thomas, 2018: 67). Ada pula yang melakukan migrasi secara spontan dengan biaya sendiri dengan tujuan untuk dapat mengubah kehidupannya ke arah yang lebih baik.

Tempat percontohan proyek transmigrasi pertama kalinya sebanyak 36 KK dari 94 jiwa dan ditempatkan di 2 (dua) unit pemukiman transmigrasi yaitu UPT Dosay, Jayapura sebanyak 9 KK dari 22 jiwa dan UPT Kumbe di Merouke sebanyak 27 KK/72 jiwa. Hingga tahun 2000, telah ditempatkan 78.650 KK dari 306.447 jiwa yang tersebar di 217 UPT.

Table.5.1
Data Penempatan Transmigrasi di Papua, Tahun 1964-2000

NO	PELITA	TAHUN	JUMLAH		KET UPT
			KK	JIWA	
1	Pra Pelita	1964-1965	267	1.000	6
2	Pelita I	1972-1973	260	1.184	Lanjutan
3	Pelita II	1974-1979	500	2.065	3
4	Pelita III	1979-1984	18.570	76.917	43
5	Pelita IV	1984-1989	10.568	46.700	28
6	Pelita V	1989-1994	17.780	69.307	54
7	Pelita VI	1994-1999	30.055	106.390	83
8	Setelah Pelita	1999-2000	650	2.884	Lanjutan
TOTAL			78.650	306.447	217

Sumber : Sumber : Dinas kependudukan dan Pemukiman Provinsi Papua, tahun 2007

Secara rinci penyebaran penempatan transmigrasi berdasarkan kabupaten sebelum terjadi pemekaran kabupaten/kota di Papua seperti terlihat pada tabel berikut, menunjukkan angka yang sama.

Tabel. 5.2
Data Penempatan Transmigrasi per Kabupaten Se-Papua

NO	KABUPATEN	JUMLAH		
		KK	JIWA	UPT
1	Jayapura	16.182	63.513	41
2	Manokwari	12.304	50.606	33
3	Sorong	10.506	40.680	30
4	Meraouke	25.197	98.943	66
5	Fakfak	6.275	22.695	18
6	Yapen Waropen	1.640	5.934	7
7	Nabire (Paniai)	6.471	23.773	21
8	Biak Numfor	75	303	1
TOTAL		78.650	306.447	217

Sumber : Dinas kependudukan dan Pemukiman Provinsi Papua, tahun 2007

Angka penempatan para transmigrasi kemudian berubah menurut data yang ada pada penduduk Papua tahun 2004 sebanyak 2.338.704 jiwa menunjukkan prosentase sebanyak 13,10 % dari penduduk keseluruhan Papua. Angka ini, bagi sebagian kalangan orang di Papua dikritisi sebagai operasi “Islamisasi” karena daerah asal peserta transmigrasi kebanyakan dari kalangan muslim yang sengaja dikirim untuk mengislamkan Papua. Terlepas dari aspek positif dari program ini bagi pembangunan Papua, terlihat perdebatan di kalangan eksekutif dan legislatif serta masyarakat luas Papua, maka sejak kebijakan desentralisasi dan diterbitkannya Undang-Undang Otonomi khusus Papua tahun 2001, program transmigrasi untuk sementara

dihentikan dan sampai saat ini tahun 2018 belum ada penempatan transmigrasi dari luar Papua.

Menurut Garnaut dan Manning dalam (Akhmad, 2005: 49), kedatangan orang Sulawesi khususnya dari kalangan Bugis-Makassar di Papua pasca berakhirnya kekuasaan kolonial tahun 1963 dan banyaknya perusahaan asing menarik diri dari Papua segera harus diisi oleh orang lain dari luar Papua. Mobilitas penduduk seperti ini dapat dikatakan bahwa motif migran datang ke Papua karena persoalan ekonomi, dan melihat Papua sebagai wilayah yang mempunyai prospek yang cerah bagi masa depan mereka dan keturunannya sehingga kemudian mereka menjadi pemain utama dalam peran ekonomi di Papua. Bahkan jauh sebelum itu sejarah jejak-jejak mereka sudah ada sejak tahun 1700an, kala itu pelaut Bugis-Makassar melakukan pelayaran Marege untuk mencari teripang sampai ke Australia Utara. Ungkapan “Marege” biasanya digunakan oleh kaum Bugis-Makassar untuk menyebut orang Papua. Dalam perjalanannya itu mereka mampir ke Papua, sebagian kemudian memilih menetap di Tanah Papua (Justeriah, 2015).

Menurut laporan ekspedisi Kompas ke Papua menyebutkan bahwa orang-orang Bugis-Makassar sudah memenuhi los-los pasar tradisional di pulau ini sejak dekade 1970-an. Di Jayapura mereka banyak berjualan di Pasar Lama Sentani, Pasar Baru Praha, Sentani, Pasar Ampera, Pasar Sentral Hamadi, Pasar Abepura, dan Pasar Yotefa. Selain di Jayapura, keberadaan pedagang-pedagang Bugis-Makassar juga banyak dijumpai di Timika, Sorong, dan Merauke. Mereka membuka usaha dari yang kecil-kecil seperti perdagangan kelontong, pengusaha hutan, sampai bisnis transportasi. Sejak diterbitkannya Instruksi Presiden Soeharto untuk pembukaan lahan di Papua, para pengusaha Bugis-Makassar merupakan salah satu pihak yang banyak mengambil untung. Mereka berani masuk ke dalam hutan, mendaki gunung dan membuka alam liar menjadi lahan-lahan yang produktif. Begitu aktifnya mereka dalam meneroka, sampai ada pameo yang mengatakan, “jika ada asap yang keluar

dari hutan-hutan Papua, maka disana ada orang Bugis-Makassar yang sedang membuka lahan” (Laporan Jurnalis Kompas, 2008).

Kedatangan migran seperti etnis Bugis-Makassar ke Papua sebagai perantau dimodali filosofi hidup “Sekali layar terkembang, pantang biduk surut ke pantai” dan budaya “siri na pa’ce/pesse” (Abdul Majid, <https://www.academia.edu>). Dalam konteks merantau di negeri orang paling tidak harus menjaga tiga hal yaitu, “*engka tellu cappa’ bokonna to laoe: iyana ritu, cappa’ lilae, cappa’ orowanewe, cappa’ kawalie*” (bahasa Bugis) “*Nia antu tallu cappa’ bokonna tu lampaiyya Iyamintu: cappa’ lila, cappa’ kabura’neang, cappa’ badi*” (bahasa Makassar). Artinya tiga bekal orang Bugis-Makassar dalam perantauan menjaga “tiga ujung” yaitu, ujung lidah, ujung kemaluan, dan ujung badik. Tiga hal tersebut dimaknai berkorelasi pada peluang sekaligus cita-cita, bahwa saat merantau harus memanfaatkan lidah dan pengetahuan lisan atau kecerdasan, ujung kemaluan berkaitan dengan niat menjaga harga diri dan membuka peluang untuk menyambung generasi, dan *kawali* atau badik berkaitan dengan keberanian dan ketegasan. Bagi orang Bugis-Makassar, merantau tidak selamanya diartikan sebagai misi penaklukan, tetapi juga ada adaptasi, atau paling rendah bertahan di negeri orang dengan hidup tidak direndahkan. “*Tallu Cappa*” merupakan proses transformasi diri, adaptasi dan bertahan hidup pada konteks ruang dan waktu.

Arus migrasi tersebut di atas terus berlangsung sehingga sampai saat ini terlihat keragaman komposisi keberadaan migran yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia sebagaimana pada Tabel berikut.

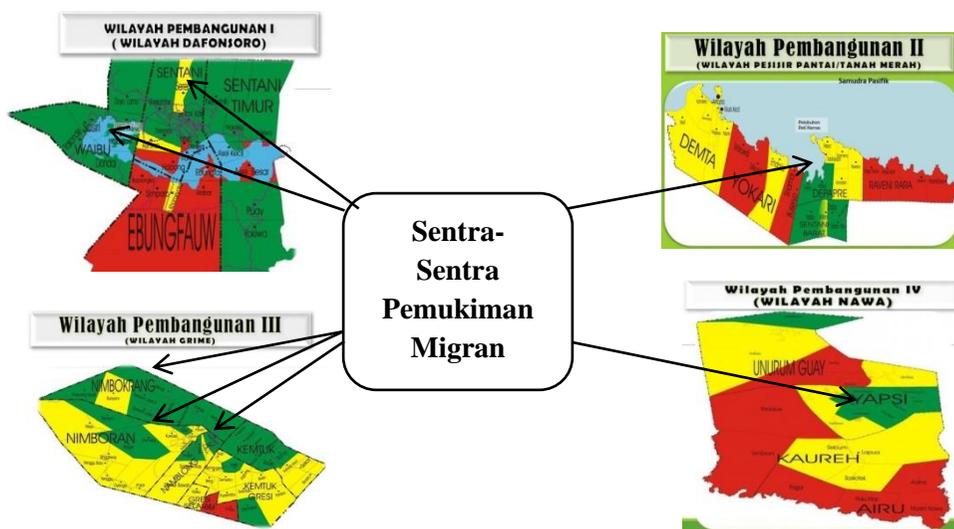
Tabel. 5.3
Jumlah Kempok Migran Kabupaten Jayapura

No	Kelompok Etnis	Jumlah	Persentasi (%)
1	Papua	150.063	65,7
2	Jawa	22.393	9,8
3	Sulawesi	16.393	7,2
4	Sumatera	7.153	3,1
5	Kalimantan	3.461	1,5
6	Maluku	11.086	4,9
7	Nusa Tenggara	5.307	2,3
8	Lain-lain	12.702	5,6
Jumlah		228.558	100,0

Sumber : Profil Kabupaten Jayapura, Tahun 2017 diolah penulis.

Keragaman suku tersebut kemudian berbaur dan menjadi solid sebagai sesama atas nama migran di wilayah Kabupaten Jayapura dengan membentuk ikatan-ikatan persaudaraan yang terbina dalam wadah paguyuban-paguyuban yang mereka sebut Paguyuban Nusantara. Organisasi kedaerahan ini kemudian berinteraksi dengan berbagai pihak termasuk dengan Orang Asli Papua. Dapat dilihat dari sentra-sentra pemukiman para migran di berbagai wilayah pembangunan distrik di Kabupaten Jayapura yang dibagi menjadi empat wilayah, meliputi wilayah pembangunan I (Dafonsoro), Wilayah pembangunan II (Pesisir/Pantai Tanah Merah), Wilayah Pembangunan III (Grime) dan wilayah Pembangunan IV (Nawa)

Gambar. 5. 1



Sumber : <https://jayapurakab.go.id/pemerintahan/sejarah/budaya/> 2012 diolah penulis.

Wilayah-wilayah pembangunan tersebut diatas dibagi dari 19 distrik yang ada, namun konsentrasi yang terbesar para migran berdasarkan jumlah penduduk berada di wilayah ibu kota yaitu di Distrik Sentani. Wilayah lainnya dihuni oleh komunitas transmigrasi dari etnis Jawa.

Uraian bahasan sebagaimana yang digambarkan pada sub bab diatas, menunjukkan bahwa keberadaan migran merupakan sejarah panjang dari bentuk ragam mobilitas penduduk Indonesia yang bermigrasi di Tanah Papua. Ada yang bermigrasi secara sukarela karena alasan klasik ingin memperbaiki tarah hidup yang sebelumnya di daerah asal kurang memberi harapan sehingga muncul niat untuk bermigrasi ke Papua karena dianggap daerah tersebut menarik dan tantangan yang dapat menghasilkan kehidupan yang lebih baik (*push and pull factor*). Ada pula yang bermigrasi karena program transmigrasi yang terstruktur dari pemerintah pusat pada masa orde baru. Kedua model migrasi

tersebut bagi konteks Papua keduanya berdampak pada realitas kehidupan Papua antara pihak migran sebagai pendatang di satu sisi dan pihak Orang Asli Papua pada sisi yang lain, baik dalam konteks sosial, politik dan ekonomi di kemudian hari.

5.1.2. Dampak Sosial Otsus dan Eksistensi Migran

Undang-Undang Otonomi Khusus Papua Tahun 2001 juga memiliki dampak sosial kultural yang terjadi secara meluas. Penafsiran masyarakat Papua terhadap afirmasi sebagai keistimewaan yang didapatkan melalui kebijakan otsus tersebut telah berkembang liar menjadi pertentangan antara Orang Asli Papua dan bukan asli Papua, "*ko pendatang*" yang distigmakan kepada masyarakat migran di satu sisi dan Orang Asli Papua dengan sebutan "*kriting*" disisi lain yang akhirnya terus berkontestasi memperebutkan peran sosial dan keagamaan di Papua. Otonomi khusus Papua telah merekognisi atas Orang Asli Papua dalam berbagai seperti bidang ekonomi, politik, termasuk sosial agama dan budaya.

Dampak dari klaim tersebut di atas mengakibatkan banyak kebijakan yang didasarkan pada pertimbangan apakah untuk Orang Asli Papua atau bukan (migran) yang dapat dimaknai secara tersirat bahwa peruntukannya untuk etnis tertentu yang mengakibatkan masyarakat terbelah pada dua kutub yang berbeda. Sebagai contoh Afirmasi di bidang pendidikan yang mengharuskan 30% dari dana alokasi otonomi khusus diberikan kepada putra-putri asli anak Papua mulai dari tingkat dasar, pendidikan menengah bahkan termasuk pada jenjang pendidikan tinggi baik di dalam maupun di luar negeri. Pemerintah Provinsi Papua, kemudian memperkuat kebijakan afirmasi tersebut dengan Peraturan Daerah Khusus Papua Nomor 5 Tahun 2006.

Hal yang sama pada keberpihakan untuk anak-anak Papua yaitu dalam penerimaan mahasiswa di Universitas Cenderawasih, yang diterima berbanding 70:30 untuk Orang Asli Papua bahkan ada yang mendesak agar pihak kampus menerima calon mahasiswa asli Papua dengan porsi 80:20 untuk anak-anak asli

Papua tanpa melihat hasil tes dan kemampuan calon mahasiswa, sebagai bagian dari alasan adanya otonomi khusus dan untuk tidak menyamakan standar perguruan tinggi yang ada di luar Papua. (<http://blogharianpapua.blogspot.com/2016/05>).

Afirmasi mengenai bantuan kepada Orang Asli Papua dalam bidang pendidikan diutarakan oleh bapak “C”, seorang pejabat Orang Asli Papua pada pemda Kabupaten Jayapura:

“...yang kami lakukan dipemberian bantuan pendidikan kita klasifikasi, ini putra Papua asal Kabupaten Jayapura, ini putra Papua keseluruhan selain dari Kabupaten Jayapura, ini sudah ada kebijakan Bupati...”¹

Pemerintah Jayapura bahkan membuat suatu program pembiayaan bagi Orang Asli Papua secara khusus dengan nama “P5” yang dipayungi dengan peraturan Bupati Jayapura, “Peraturan Bupati Nomor 11 tahun 2008 tentang ketentuan Bagi Peserta Program Penelusuran dan Pengembangan Potensi Putra-Putri Papua (P5) Asli Kabupaten Jayapura”. Mereka diberikan kesempatan mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi melalui program tersebut termasuk memberikan beasiswa bagi mahasiswa asli Papua yang berprestasi pada berbagai bidang termasuk bidang yang langka untuk melaksanakan studi di dalam dan luar negeri. Hal yang sama Pemerintah Kabupaten Jayapura dalam hal ini Bupati Jayapura, mengeluarkan suatu surat keputusan yang bagi pembiayaan pendidikan bagi Orang Asli Papua, Surat Keputusan Bupati Nomor 188.4/286 Tahun 2017 tentang Penetapan Mahasiswa Penerima Dana Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa Asal Kabupaten Jayapura Yang Bersumber dari Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2017.

Sementara itu, bagi anak-anak migran tidak dapat memperoleh hal yang sama karena tidak termasuk dalam kebijakan afirmasi. Dana otonomi khusus yang dikelola oleh pemerintah dalam bidang pendidikan hanya untuk kalangan Orang Asli Papua. Padahal, bagi pemerintah selayaknya memberikan bantuan pendidikan kepada semua rakyatnya tanpa

¹ Wawancara dengan bapak “C”, hari Senin tanggal 02 Oktober 2017

harus membeda-bedakan antara satu dengan yang lain, tetapi kenyataannya hal ini terjadi bagi migran tanpa ada komplek secara terbuka mereka lakukan kepada pemangku kepentingan. Dana otonomi khusus untuk bidang pendidikan Papua terbilang besar, jauh di atas angka alokasi dana lain seperti kesehatan. Tabel 5.4 berikut memberikan informasi mengenai distribusi alokasi anggaran pada beberapa sektor.

Tabel. 5.4
Alokasi Dana Otonomi khusus Papua Kabupaten Jayapura

NO	BIDANG OTSUS	JUMLAH ALOKASI
1	Pendidikan	31.075.191.600
2	Kesehatan	15.537.595.800
3	Ekonomi Kerakyatan	25.895.993.000
4	Infrastruktur Dasar	20.716.794.400
5	Afirmasi	6.215.038.320
6	Perencanaan, Pengendalian Dan Pengawasan	2.071.679.440
7	Lainnya	2.071.679.440
JUMLAH		103.583.972.000

Sumber: Data diolah dari BAPEDA, Kabupaten Jayapura, Tahun 2018

Selain bidang pendidikan, bidang kesehatan juga terjadi pengistimewaan kepada Orang Asli Papua. Undang-undang otonomi khusus Papua mengharuskan setiap anggaran dana otonomi khusus untuk dialokasikan 15% pada bidang ini. Lalu pembiayaan ini kemudian dikuatkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Papua, dan Peraturan Nomor 8 Tahun 2014 untuk kabupaten/kota se-Papua. Wujudnya lahirlah Kartu Papua Sehat

(KPS) yang dipakai oleh Orang Asli Papua untuk berobat mulai pada tingkat puskesmas samapai dengan rumah sakit tanpa harus mengeluarkan biaya. Orang Asli Papua dapat pergi ke tempat pelayanan kesehatan dengan membawa kartu tersebut sebagai kartu sakti untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Pemerintah Papua dalam hal ini selalu mengarahkan kepada aparat pelayan kesehatan agar pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan di Papua dari tingkat Puskesmas sampai Rumah Sakit untuk memperhatikan keberpihakan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat adat atau Orang Asli Papua, termasuk arahan kepada aparat terkait untuk menyediakan surat bebas biaya pengobatan bagi pasien yang masuk atau berobat tanpa dipungut biaya.

Kelompok migran pada situasi tersebut di atas tampak bahwa aturan dan kebijakan yang diambil pemerintah Papua dan Kabupaten/Kota pada masa Otonomi khusus memang menguntungkan Orang Asli Papua, tetapi cenderung “merugikan” kaum migran. Mereka tidak mendapatkan fasilitas seperti yang didapatkan oleh Orang Asli Papua. Migran sangat mengerti keadaan tersebut untuk tidak melakukan protes karena saat ini adalah era otonomi khusus yang memberikan keberpihakan kepada Orang Asli Papua dalam bidang kesehatan yang sesungguhnya bagi masyarakat migran tidak semua mampu dalam pembiayaan kesehatan.

Di samping soal bantuan pendidikan dan kesehatan, dalam hal bantuan keagamaan juga terjadi pemberian porsi lebih banyak diberikan kepada pihak orang asli yang notabene adalah “Kristen”. Bahkan, dana alokasi otonomi khusus Papua dalam bidang keagamaan semua hanya diberikan kepada lembaga-lembaga dan rumah ibadat Protestan dan Katolik. Hal ini terjadi, disamping karena karena spirit otonomi khusus, juga karena selama ini Papua dikalim sebagai “tanah yang diberkati.” Karena merasa umat mayoritas seperti pada wilayah lain “Serambi Mekah, di Aceh dan “Serambi Madinah” Sulawesi Selatan (Hasse, 2018) Adalah jargon yang selama ini digelorakan di hampir semua wilayah di tanah Papua, bahwa tersirat makna klaim yang

mengatakan bahwa sesungguhnya tanah Papua milik orang-orang Kristen baik Protestan maupun Katolik, yang lain bukan pemilik dan pendatang baru yang mendiami negeri Papua sehingga rasa menyebut nama Orang Asli Papua, maka seperti diasosiasikan dengan “Kristen” sedangkan bila menyebut migran, maka diasosiasikan kepada “Islam” (Alhamid, 2016).

Kemudian semangat ini berdampak pada soal bantuan keagamaan. Dana otonomi khusus Papua hanya untuk Orang Asli Papua dalam bidang keagamaan. Untuk Islam tidak dapat memperolehnya dengan alasan soal kekhususan tersebut. Seakan-akan alasan bagi umat Islam tidak dapat memperoleh porsi bantuan dari dana otonomi khusus Papua tersebut karena mereka lebih dilihat sebagai kelompok migran. Kalau pun mereka mendapatkan dana bantuan keagamaan untuk lembaga-lembaga atau rumah ibadat umat Islam mereka dapatkan dari bantuan sosial dan lebih dikarenakan pada kebijakan dan kadangkala lewat pendekatan komunikasi ke pemerintah. Data alokasi bantuan dana otonomi khusus Papua untuk lembaga keagamaan di Kabupaten Jayapura terlihat pada tabel berikut.

Tabel. 5.5
Alokasi Bantuan Dana Keagamaan Dana Otsus Papua
Kabupaten Jayapura

NO	LEMBAGA	JUMLAH
1	Lembaga Keagamaan	3.420.000.000
2	Lembaga Masyarakat Adat	1.800.000.000
3	Lembaga Perempuan Papua	1.000.000.000
JUMLAH		6.220.000.000

Sumber: Data diolah dari BAPEDA, Kabupaten Jayapura, Tahun 2018

Bagian dari data tersebut di atas dapat dilihat sebagai peruntukan dana bagi Orang Asli Papua dalam bidang keagamaan, namun bila diperhatikan juga tampak afirmasi kepada lembaga masyarakat adat Papua dan lembaga perempuan Papua. Ketiga lembaga tersebut sebenarnya satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari etnis kepapuaan dalam bidang agama. Orang Asli Papua sudah terlanjur mendominasi wacana publik bahwa mereka adalah kristen dan katolik, sementara Islam terlanjut diidentikkan dengan migran. Dampaknya tentu terjadi segmentasi dalam masyarakat yang menjurus pada aspek-aspek yang menyebabkan terjadinya dominasi tertentu dalam berbagai hal dalam hubungan antara Orang Asli Papua dan migran.

Sentimen keagamaan lain yang mencuat dari semangat otonomi khusus Papua yaitu soal yang terkait dengan pendirian rumah ibadat. Masalah pendirian rumah ibadat selalu menjadi masalah sensitif pada masyarakat yang telah tersegmentasi pada kelompok mayoritas dan minoritas yang kadangkala menjurus pada gesekan sosial etnis keagamaan sebagaimana yang diutarakan oleh Kusumadewi dalam (Wirutomo, 2012). Kasus pendirian gereja di Depok, Banten, Medan, Aceh sebagai wilayah kelompok mayoritas Islam dengan kristen sebagai kelompok minoritas seringkali terjadi masalah, demikian pula pada wilayah yang mayoritas kristen atau non muslim dalam pendirian masjid seperti di Manado, di Bali, di NTT, di Maluku juga mengalami hal yang sama dengan mendapat komplien dari kelompok masyarakat mayoritas.

Seperti halnya kasus pembangunan masjid Agung al Aqsha Sentani di Kabupaten Jayapura tahun 2018, Papua yang diprotes secara terbuka oleh pengurus Persekutuan Gereja Gereja Jayapura (PGJJ). Orang Asli Papua sebagai kelompok mayoritas kristen dan migran sebagai kelompok minoritas Islam. Namun ada yang berbeda dengan kasus di atas sebab, kemunculan protes yang keras terhadap pendirian rumah ibadat tersebut karena Orang Asli Papua lebih banyak disemangati oleh kekhususan Papua. Dalam pernyataan ketua PGGJ, dengan jelas mengatakan

bahwa Papua adalah wilayah otonomi khusus, tidak ada orang Islam atau ustads atau pak haji yang datang ke Tanah Tabi (Jayapura) membuka peradaban orang Papua (Pernyataan PGGJ, 2018).

Sentimen keagamaan seperti tersebut di atas menjadi sulit untuk diredam apabila sudah memasuki wilayah yang sensitif. Walaupun sebenarnya “isu agama” di sini cenderung menjadi arena pertentangan yang sumbernya mungkin di luar soal keimanan masing-masing. Agama menjadi penegas perbedaan identitas antara Papua dan migran. Di era Otonomi Khusus berkembang wacana seolah-olah agama Orang Asli Papua adalah Kristen. Sementara Islam dianggap sebagai agama kaum migran. Sehingga mereka merasa perlu menegaskan harga diri sebagai tuan di tanah sendiri, ”Tanah yang dijanjikan”. Di sinilah perbedaan menjadi sulit untuk dikompromikan. Sebab, ada kontestasi identitas yang terjadi dan cenderung terus dipertahankan (Jubba, dkk, 2020).

Uraian di atas mengantarkan pada sebuah realitas yang terjadi dalam kehidupan sosial keagamaan di Kabupaten Jayapura. Antar komunitas saling berhadapan antara Orang Asli Papua dan migran. Keberpihakan yang didapatkan oleh Orang Asli Papua dari otonomi khusus Papua telah membuka jalan pembedaan-pembedaan dalam masyarakat yang berujung pada adanya dominasi dalam aspek-aspek khusus. Ketika masyarakat migran merasakan adanya tekanan yang dirasakan mengurangi akses dan pergerakan dalam hubungan-hubungan sosial keagamaannya, komunitas migran menyiasati dengan beradaptasi sambil mencari celah keluar dari tekanan tersebut. Di bidang agama, migran melakukan komunikasi yang intensif, khususnya para tokoh migran kepada tokoh Orang Asli Papua dalam rangka meneguhkan semangat kebersamaan. Strategi seperti ini juga dapat ditemukan pada pertemuan antara Muslim dan Towani Tolotang di Sulawesi Selatan (Jubba, dkk, 2019).

Dampak kebijakan otonomi khusus Papua terhadap kehidupan sosial yang mengarah pada “keistimewaan”, baik

status, perlakuan, maupun akses bagi orang Papua. Hal ini juga mengakibatkan masyarakat tersegmentasi ke dalam dua kutub; orang asli dan migran. Posisi ini berimplikasi luas pada seluruh aspek kehidupan. Proses marginalisasi migran pun terjadi seiring dengan penguatan identitas orang Papua. Secara langsung, otonomi khusus juga mempengaruhi penguasaan sektor kehidupan seperti keberpihakan dalam mendapatkan akses bantuan pendidikan dan keagamaan sehingga, pihak migran melihat perlunya melakukan cara lain untuk tetap eksis. Segmentasi masyarakat yang terus terjadi menegaskan adanya upaya yang direproduksi secara berkelanjutan dalam rangka mempertahankan kekuatan di satu sisi, dan menunjukkan penguatan identitas primordial di sisi lain. Pola relasi kedua kelompok masyarakat kemudian mengalami fluktuasi kondisi yang ditandai oleh semakin menguatnya ikatan-ikatan kelompok dan beragamnya pilihan strategi bagi masing-masing kelompok untuk mempertahankan kelompok.

5.2 Hubungan Sosial Kontestatif-Adaptif

Orang Papua mengkonstruksi diri mereka, begitu pula masyarakat migran. Konstruksi di sini selalu dilihat sebagai sebuah kerja kognitif individu untuk melakukan tafsiran terhadap realitas yang ada sebagai akibat relasi sosial antara individu dengan lingkungan atau orang disekitarnya. Menurut Berger, individu kemudian membangun sendiri pengetahuan atas realitas yang dilihat itu berdasarkan pada struktur pengetahuan yang telah ada sebelumnya (Berger, 1990). Migran Muslim yang menyebar dan menjadi pengetahuan umum orang banyak setelah berinteraksi dengan Orang Asli Papua yang akhirnya saling mengenal satu sama lain.

Sejalan dengan model relasi yang dibangun dibidang ekonomi dan politik yang ternarasi diatas menunjukkan adanya hubungan yang positif ditengah berbagai tekanan, resistensi segmentasi bahkan konflik kepentingan yang terjadi antara Orang Asli Papua dengan para migran. Dalam kehidupan sosial

keagamaan, peristiwa-peristiwa dan kebijakan-kebijakan yang membelah masyarakat dalam dua kelompok dengan beda perlakuan juga dapat disaksikan secara nyata dan menjadi bagian dari kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah daerah. afirmasi terhadap orang papua dalam bidang pendidikan, kesehatan dan keagamaan direspon secara positif oleh para migran dengan tidak menunjukkan reaksi yang berlebihan.

Dalam bidang pendidikan, kebijakan terhadap keberpihakan kepada orang asli dalam penerimaan mahasiswa baru di Universitas Cenderawasih memberi contoh betapa afirmasi telah membuat generasi penerus bangsa terpaksa atau dipaksa untuk mengakui bahwa telah terjadi stratifikasi kesempatan dalam mengakses dunia pendidikan di Papua. Penerimaan mahasiswa yang diterima berbanding 70:30 untuk Orang Asli Papua bahkan ada desakan dari publik Papua agar pihak kampus menerima calon mahasiswa asli Papua dengan porsi 80:20 dengan tidak mengikuti pola penerimaan seperti yang perguruan tinggi lain di Indonesia karena alasan bahwa akses informasi, jangkauan dan transportasi yang begitu sulit khususnya bagi wilayah-wilayah yang jauh dari pusat kota Jayapura yang tidak memungkinkan bagi mereka disamakan seperti perlakuan yang terjadi di tempat lain.

Kebijakan yang sama juga terjadi di Kabupaten Jayapura, bahkan cenderung lebih keras rasa keberpihakan kepada Orang Asli Papua dengan prioritas pemberian bantuan pendidikan kepada anak-anak Papua mulai dari tingkat pendidikan menengah, termasuk pada jenjang pendidikan tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan dasar Peraturan Bupati Nomor 11 tahun 2008 tentang Ketentuan Bagi Peserta Program Penelusuran dan Pengembangan Potensi Putra-Putri Papua (P5) Asli Kabupaten Jayapura. Mereka dibiayai dari dana alokasi otonomi khusus Papua. Bahkan dalam surat keputusan Bupati Nomor. 188.4/286 Tahun 2017 tentang Penetapan Mahasiswa Penerima Dana Bantuan Pendidikan Bagi Mahasiswa Asal Kabupaten Jayapura Yang Bersumber dari Dana Otonomi

Khusus Tahun Anggaran 2017 memberikan beasiswa bagi mahasiswa asli Papua yang berprestasi pada bidang-bidang langka yang melaksanakan studi di dalam dan luar negeri. Pemerintah secara nyata menetapkan alokasi dana otonomi khusus Papua untuk keperluan anak asli dalam pendidikan dengan harapan anak-anak Papua dapat maju dan berprestasi seperti pada daerah-daerah lain yang mengangkat nama daerah. Namun pada sisi lain keberpihakan ini membuat keadaan migran terdeskriminasi dari situasi yang sebenarnya bagian untuk alokasi dana pendidikan diberikan porsi untuk semua kalangan agar keadilan dalam biaya pendidikan dirasakan oleh semua kalangan tanpa ada yang merasa dianak tirikan.

Demikian pula pada bidang kesehatan, Pemerintah Papua dalam hal ini selalu mengarahkan agar pelaksanaan kebijakan di bidang ini dari tingkat Puskesmas sampai rumah sakit untuk keberpihakan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat adat atau Orang Asli Papua yang ditandai dengan menetapkan alokasi 15% dana otonomi khusus Papua sebagaimana amanat dari undang-undang otonomi khusus Papua tersebut. Penggunaannya diwujudkan dalam dua hal, yaitu pelayanan kesehatan kepada khusus Orang Asli Papua dan peningkatan sumberdaya tenaga kesehatan Orang Asli Papua. Untuk pelayanan kesehatan bagi Orang Asli Papua dilakukan dengan skala prioritas pelayanan di rumah sakit sampai puskesmas secara gratis tanpa dipungut biaya, Orang Asli Papua diberikan Kartu Papua Sehat (KPS) sebagai tanda khusus untuk dapat berobat secara cuma-cuma, baik dalam rawat jalan maupun rawat inap. Sementara pembiayaan peningkatan sumberdaya tenaga kesehatan Orang Asli Papua merupakan bentuk upaya pemerintah daerah dalam pengalokasian anggaran bagi tenaga-tenaga kesehatan Orang Asli Papua untuk meningkatkan kemampuan dalam pelayanan kepada masyarakat. Mereka banyak dikirim untuk sekolah atau melanjutkan pendidikan ke institusi-institusi pendidikan kesehatan, baik yang di Jayapura maupun di luar Papua khususnya di pulau Jawa.

Demikian pula dalam hal bantuan keagamaan, porsi lebih banyak diberikan kepada pihak orang asli yang notabene adalah “Kristen”. Bahkan alokasi dana otonomi khusus Papua dalam bidang keagamaan hanya untuk lembaga-lembaga dan rumah ibadat Protestan dan Katolik dari dana otonomi khusus Papua tersebut. Sementara untuk Islam tidak dapat menerima dana tersebut, karena ketetapan pemerintah baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota hanya mengalokasikan pada lembaga-lembaga atau rumah ibadat Protestan dan Katolik tersebut, bagi lembaga Islam kalau pun mendapatkan dana bantuan keagamaan dari pemerintah biasanya lebih bersifat kebijakan berupa jumlah nominal yang diberikan. Untuk mendapatkan bantuan sosial keagamaan, seperti untuk masjid dan lembaga atau ormas keagamaan, tergantung dari kemampuan migran muslim melakukan komunikasi atau pendekatan kepada pemerintah daerah, walau kadangkala dirasa jumlah sangat relatif sedikit dibandingkan dengan bantuan kepada pihak yang lain.

Sejalan dengan hal di atas, diakui oleh bapak “I” salah satu pimpinan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Jayapura:

“...dari muhammadiyah mengajukan sesuatu kepada PEMDA, tidak mengakomodir sesuai dengan jumlah itu antara pendatang dengan orang Papua akhirnya mungkin kita yang muslim itu, mungkin ya..merasa tidak adillah karena tidak diperhatikan oleh PEMDA,”²

Demikian pula hal yang sama diutarakan oleh bapak “J”, Tokoh Masyarakat, sekaligus tokoh pendidikan Yayasan Pondok Karya Pembangunan (YPKP) Sentani yang mengatakan:

“... keagamaan itu meskipun porsinya tidak sebesar yang mereka dapatkan itu juga, ada terutama ya dari misalnya gunung merah (Pemda)... dulu malah agak banyak sekarang kelihatannya ee...malah tidak kelihatan begitu...”³

² Hasil wawancara dengan “I”, hari Rabu Tanggal 19 Juli 2017

³ Hasil wawancara ” J”, hari Minggu Tanggal 09 Juli 2017

Bantuan yang diberikan kepada lembaga keislaman mengalami perubahan tidak seperti apa yang diterima di masa lalu seperti di masa otonomi sekarang. Hal ini menjadi bukti adanya dampak kebijakan dari pemberlakuan otonomi saat ini terhadap lembaga atau yayasan pendidikan.

Biasanya waktu pembagian bantuan tersebut kepada lembaga-lembaga dan organisasi keagamaan biasanya dilaksanakan pada momen-momen tertentu. Momen tersebut seperti pada hari-hari keagamaan yang bernama safari Ramadhan dan halal bihalal dan untuk kalangan Kristen dalam safari natal yang diprogramkan oleh pemerintah sendiri. Demikian juga saat masyarakat mengadakan kegiatan keagamaan yang bersifat mandiri lalu kemudian mengundang pemerintah daerah untuk hadir di acara tersebut, maka kedatangan untuk hadir di tempat acara tersebut dijadikan sebagai media untuk dapat bertemu dengan masyarakat sebagai bentuk perhatian pemerintah sekaligus kesempatan itu digunakan untuk menyerahkan bantuan.

Dalam konteks ini apa yang didapatkan oleh Orang Asli Papua dalam bidang pendidikan dengan afirmasi bantuan kepada mereka dan sebaliknya bagi migran tidak memperoleh apa-apa dari hal tersebut. Demikian pula afirmasi dalam bidang kesehatan yang tidak didapatkan oleh migran, begitu pula pada bidang keagamaan yang telah ditentukan alokasinya pada lembaga-lembaga keagamaan di Papua, walau bagi migran sendiri masih dapat menemukan dari alokasi lain selain dana otonomi khusus, walau dalam jumlah nominal yang tidak ideal bagi mereka, dan masyarakat migran sendiri merasa dalam tekanan dan “diskriminasi” oleh keadaan, namun akhirnya tidak melakukan reaksi yang berlebihan karena merasa sebagian keinginan migran ada yang telah diakomodasi oleh pemerintah.

Dalam beberapa konteks tertentu migran memang harus merespon dengan sangat keras, seperti peristiwa demonstrasi membela Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh Barisan Rakyat Pembela NKRI, tanggal 2 Juni 2016 atas aksi dan pernyataan kelompok –kelompok Orang Asli Papua bahwa

keberadaan pemerintah Indonesia di Papua adalah adalah kolonial atau penjajah sejak Papua berintegrasi dengan Indonesia setelah hasil Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) tahun 1969. Demonstrasi yang dimobilisasi oleh kebanyakan masyarakat migran Sentani, Kabupaten Jayapura merupakan bagian dari cara menunjukkan eksistensi mereka terhadap kelompok tersebut di atas dan sebagai kohesi sosial agar terjadi keseimbangan dalam kehidupan masyarakat yang selama ini didominasi isu kurang baik lebih banyak dari kelompok Orang Asli Papua terhadap migran, sampai memasuki wilayah isu agama walaupun juga migran menyadari adanya politik afirmasi yang didapatkan oleh Papua.

Demikian pula kasus renovasi dan perluasan masjid Agung Al-Aqsha Sentani adalah contoh yang bisa menjelaskan situasi di atas. Masjid Agung Al-Aqsha adalah masjid tertua di kota Sentani. Pada awal tahun 2018 masjid ini menjadi polemik karena renovasi dan pendirian menara ditentang oleh pihak gereja. Keberatan utama adalah soal pembangunan menara yang cukup tinggi sehingga menimbulkan kesan megah dibandingkan gereja di sekitarnya. Sementara tidak jauh dari masjid itu berdiri beberapa bangunan gereja. Kesan masjid yang lebih megah dari pada gereja telah menimbulkan kekuatiran bahwa akan muncul persepsi tentang orang asli yang secara ekonomi kalah dan "dijajah" oleh kaum migran. Reaksi dari masalah ini terpaksa harus dilakukan juga oleh para migran dengan lebih banyak melakukan konsolidasi internal, sebab masalahnya telah lebih melebar kepada isu agama, Kristen versus Islam saling berhadapan untuk sebuah kontekstasi pada ruang-ruang publik. Ketegangan hubungan antara orang asli dengan migran tidak terhindarkan yang bisa saja sulit untuk diredam bila seandainya sampai terjadi gesekan fisik. Agama cenderung menjadi arena pertentangan yang sumbernya mungkin di luar soal keimanan masing-masing yang digunakan hanya sebagai penegas perbedaan identitas.

Polemik ini sempat menjadi isu nasional yang kemudian diselesaikan oleh sebuah tim yang disepakati yaitu "Tim Enam"

yang dibentuk oleh pemerintah daerah Kabupaten Jayapura. Tim bersama tersebut menghasilkan kesepakatan berupa usulan agar tinggi menara masjid disesuaikan dengan tinggi kubah masjid, dan juga pihak Kristen dapat memiliki rumah ibadah yang besar dan megah di kota Sentani sebagai ikon ibukota Kabupaten Jayapura. Tindak lanjutnya pun dapat berjalan dengan baik dengan dimulainya peletakan batu pertama pembangunan gereja yang akan megah di Kota Sentani seperti gereja Katolik yang bersebelahan dengan Masjid Agung Al Aqsha Sentani dan gereja Marthen Luter yang juga tidak jauh dari gereja Katolik.

Penyelesaian kasus tersebut di atas dapat cepat diatasi karena secara moril Kabupaten Jayapura harus senantiasa menjaga apa yang telah dirintis dengan suatu pencanangan yang dianggap monumental dalam sejarah Kabupaten Jayapura yaitu "Jayapura sebagai Zona Integritas Kerukunan Beragama di Indonesia". Pencanangan itu dilakukan saat Pemerintah Kabupaten Jayapura menggelar dua kegiatan besar, yaitu Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-26 tingkat Provinsi Papua dan Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) ke-1 Tingkat Kabupaten Jayapura pada 28 Mei 2016. Dua agenda besar ini dilaksanakan secara bersamaan dan dibuka secara resmi oleh Menteri Agama, Lukman Hakim Saifudin. Tujuan pencanangan Zona Integritas tersebut agar semua warga untuk selalu menyadari tentang arti bagaimana kerukunan hidup antara berbagai pihak dapat menjadi tonggak utama dari ketahanan dalam bermasyarakat dari beragam suku, agama dan etnis yang ada di Kabupaten Jayapura, hidup saling berdampingan secara damai.

Pertemuan-pertemuan migran pada ranah sosial keagamaan ini pada akhirnya menunjukkan kepada sebuah hubungan yang mencoba saling adaptif karena adanya dinamika dan realitas yang terjadi di era otonomi khusus Papua. Kewenangan yang didapatkan selama ini yang mengafirmasi Orang Asli Papua dalam segala hal, termasuk dalam hal yang berkaitan dengan konteks keagamaan dan yang mengitarinya.

Contoh kongkrit terkait Orang Asli Papua dan migran saling beradaptasi yaitu bila terjadi perayaan yang bersifat keagamaan pemerintah berusaha untuk menjadi mediator untuk mengatur dan menjadi kepanitian bersama (Islam dan non Islam). Sehingga diantara mereka saling mengerti dan memahami posisi masing-masing dalam konteks yang tidak masuk dalam ranah “pokok agama”, tetapi hanya bagaimana acara dapat berlangsung dengan sukses dan lancar. Migran pada posisi menjaga keyakinan agamanya dengan konsep maqasid (*hifz al-din*), tetapi dalam makna yang lain yaitu menghormati kebebasan beragama yang disebut oleh Audah (2015) *freedom of belief*. Pada posisi ini migran mengadaptasikan dirinya dalam konteks ini agar terjadi keharmonisan dalam hubungan-hubungan yang ada di tengah adanya klaim-klaim selama ini yang menganggap bahwa Papua lebih dimiliki oleh etnis tertentu dari yang lainnya.

Kontestasi yang terjadi antara Orang Asli Papua dengan para migran terjadi dalam suasana yang sangat cair, penuh dinamika, mendahulukan kepentingan umum, kebersamaan dalam perbedaan, namun disaat yang bersamaan keistimewaan terhadap orang asli tetap dikedepankan. Terbangun kesadaran kolektif bagi para migran bahwa saat ini era yang membawa Orang Asli Papua untuk lebih di depan terkait dengan keberpihakan dan kewenangan yang lebih dari migran itu sendiri.

Reaksi-reaksi kecil memang banyak terjadi akibat adanya afirmasi, namun tidak cukup kuat untuk mengantarkan masyarakat pada konflik yang berskala besar karena seakan terbangun sebuah kesepakatan bahwa kontestasi yang terjadi seharusnya tidak menjadi medan gesekan yang dapat menyebabkan kerugian kedua belah pihak antara Orang Asli Papua dan migran pada ranah-ranah sosial yang ada. Setiap aksi pasti ada reaksi. Aksi yang sejak lama telah terkait Papua didominasi oleh masyarakat migran di Papua, menyebabkan Orang Asli Papua bereaksi untuk menuntut keberpihakan bahkan menuntut merdeka dan keluar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pada hari ini keadaan tersebut

berbalik untuk Orang Asli Papua karena era yang menghendaki adanya keberpihakan untuk mereka menyebabkan masyarakat migran bereaksi dan mencari jalan keluar dari masalah yang menimpanya dengan berkreasi terhadap nilai-nilai yang ada pada mereka dengan cara adaptasi sehingga dapat eksis di tengah banyaknya tekanan di masa otonomi khusus Papua.

Akhirnya, narasi yang terurai diatas mengantarkan pada sebuah kesimpulan bahwa hubungan-hubungan yang terjadi selama ini antara migran dan Orang Asli Papua sebenarnya adanya kontestasi di ranah ruang-ruang publik untuk memperlihatkan eksistensi mereka. Bagi para migran, hak yang ada pada Orang Asli Papua mengharuskan mengakui hal tersebut sebagai realita yang harus diterima, namun karena juga adanya tuntutan yang tetap bertahan hidup, maka jalan yang dapat dilakukan dengan keadaan tersebut yaitu beradaptasi. Ibarat orang yang kalah, bersikap melawan terhadap keadaan bagi migran, tanpa harus berkonfrontasi secara terbuka kepada pihak yang telah mendominasi keadaan adalah pilihan yang sulit namun dapat menjadi tameng.

5.3 Penguatan Identitas Organisasi dan Lembaga Pendidikan

Sejak integrasi Papua ke dalam Negara Republik Kesatuan Indonesia (NKRI) tahun 1969, maka sebagai konsekuensi, secara administratif lahir Provinsi Irian Jaya (Papua) dan beberapa daerah otonom kabupaten tingkat II. Setiap kelahiran daerah otonomi baru biasanya diikuti oleh perangkat-perangkat negara yang lain, tidak terkecuali diikuti pula pendirian organisasi kemasyarakatan oleh masyarakat setempat mengikuti induk organisasi yang telah ada di pusat. Organisasi-organisasi seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah, Nahdatul Ulama (NU) serta Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) telah ada di Papua, bahkan organisasi sosial kemasyarakatan seperti Muhammadiyah terlebih dahulu sudah ada di Papua sebelum Papua berintegrasi ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5.3.1. Organisasi Kemasayarakatan Islam dan Kedaerahan

Kehadiran organisasi-organisasi kemasyarakatan seperti yang telah disebutkan di atas, selain sebagai media dakwah bagi umat Islam, juga menjadi sarana ‘penyambung’ semangat nasionalisme. Para tokoh organisasi kemasyarakatan seperti Muhammadiyah dan NU yang telah ada sebelum Indonesia berdiri sebagai pendiri dan peletak pondasi bangsa ini mampu mengantarkan dan mewariskan semangat kebangsaan yang luar biasa untuk diteruskan kepada generasi berikut dalam kerangka NKRI yang dibangun di atas realitas keragaman. Setelah itu, organisasi sosial lain pun berdiri, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang lahir pada tahun 1975. MUI menjadi tenda besar yang mewadahi semangat kebersamaan untuk mengawal serta memberdayakan umat Islam.

Organisasi-organisasi tersebut eksis dan telah menjangkau wilayah kabupaten/kota yang ada di Papua saat ini. Tidak bisa dipungkiri bahwa kehadiran beberapa organisasi keagamaan ini lahir dan atas prakarsa tokoh migran. Mereka berkolaborasi dalam kesatuan etnis dan agama sekaligus membangun kemitraan dengan pemerintah daerah dalam kegiatan apa pun terkait bidang sosial termasuk kegiatan hubungan lintas agama. Kontribusi kelembangaan organisasi keagamaan ini dapat dilihat dalam perannya menginisiasi berbagai forum lintas iman, selain melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat pembinaan internal. Organisasi-organisasi ini pun berfungsi sebagai tempat melakukan konsolidasi umat dalam menghadapi berbagai persoalan. Selain itu, identitas migran juga terus direproduksi melalui organisasi sosial keagamaan tersebut. Penguatan identitas pun di satu sisi terjadi, dan menjadi identitas yang cair ketika berhadapan dengan identitas pada sisi lain. Di sini tampak adanya upaya migran melakukan konsolidasi sebagai bagian penting dari pemeliharaan identitas dan sebuah terobosan baru dalam rangka melakukan komunikasi dengan pihak luar (Sheldon, 2017); Lukmantoro dalam (Buchori, 2014: 20).

Apa yang dilakukan oleh migran melalui organisasi-organisasi sosial seperti Muhammadiyah, NU, MUI, dan BKMT merupakan langkah penting dalam menegaskan eksistensi dan memperkuat posisi. Dalam konteks ini, politik identitas pun semakin mengemuka sebagai respons terhadap tekanan dan kondisi sosial di Jayapura. Bagi migran, dalam kacamata peneliti, ini merupakan tindakan yang bertujuan untuk mengedepankan kepentingan-kepentingan dari anggota kelompoknya meskipun memiliki risiko termasuk dianggap mementingkan kepentingan sendiri. Seorang informan, mengemukakan bahwa otonomi khusus Papua memang telah menjadi bagian dari sejarah dan tantangan bagi migran sehingga harus memperkuat organisasi yang selama ini menjadi payung besarnya. Lebih jauh bapak “G” mengatakan:

“Menurut saya, ormas ataupun lembaga itu memang harus diperkuat oleh pendatang muslim, secara politis ini kita (migran) akan dihitung kalau kita kuat. Untuk kita kuat harus melalui satu wadah, apalagi kalau organisasi itu secara struktural sampai di pusat itu pasti akan pasti diperhitungkan dan di situlah wadah kita untuk kita bisa melakukan berekspresi, sebab kalau kita tidak melalui itu ya..akan sulit apalagi adanya undang-undang otsus ini kalau kita tidak berperan bersama-sama di ormas - ormas apa saja”⁴

Sudah menjadi hal yang penting bagi migran kiranya untuk menjadikan ormas atau lembaga sebagai tempat untuk menyuarakan apa yang terkait dengan kepentingannya di era otonomi khusus. Oleh karena itu, diperlukan peran-peran yang penting bagi organisasi sosial kemasyarakatan untuk menjembatani kepentingan bersama selama ini. Organisasi-organisasi tersebut tidak saja hadir sebagai identitas migran, tetapi juga menjadi media bahkan alat perjuangan, termasuk media bernegosiasi dengan pihak-pihak luar, dalam hal ini Orang Asli Papua.

⁴ Wawancara dengan “G”, Tanggal 16 Oktober 2017 di Sentani.

MUI atau Majelis Ulama Indonesia yang berdiri tahun 1975 di masa orde baru, juga diikuti berdirinya MUI di Papua pada tahun 1978 di Jayapura dengan ketua H. Latunra (Suriyawardi, 2015), seorang agamawan sekaligus pengusaha. Lembaga ini merupakan lembaga atau organisasi yang berperan mewadahi para ulama, zu'ama dan cedikiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi umat Islam. Di antara peran MUI yang menonjol dalam masyarakat dari peran – peran yang lain adalah peran *khidmatul ummah* (melayai masyarakat) dan *himayatul ummah* (melindungi umat). Dalam konteks Papua kedua peran ini banyak dilakoni oleh MUI Papua untuk menjembatani masalah-masalah yang terkait dengan hubungan umat Islam dengan Orang Asli Papua yang terlanjur diidentikkan dengan Islam. Sebagai contoh ketika di awal pemberlakuan otonomi khusus Papua tahun 2001 yang diwarnai banyak gejolak sosial politik yang mengarah pada mengerasnya identitas kelompok, etnis, suku dan ideologi agama. MUI pun terlibat secara aktif dalam ide “Papua Tanah Damai” tahun 2005. Demikian pula keterlibatan MUI dalam setiap dialog bersama, dan pawai yang diselenggarakan oleh Forum Konsultasi para Pemimpin Agama (FKPPA) tahun 2007, keterlibatan MUI dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) serta keikut-sertaan dalam berbagai seruan dan pernyataan bersama dengan para pemimpin agama yang ada di Papua.

Peran penyelesaian persoalan oleh MUI Papua dengan pihak agama lain (Kristen) adalah kasus tentang pendirian manara masjid Agung Al Aqsha Sentani tahun 2018. Kasus ini sempat menjadi isu nasional yang membangkitkan emosi dan sentimen agama. Dalam hal ini, Pihak PGGJ atau Persekutuan Gereja-Gereja Jayapura melakukan protes terhadap pendirian menara tersebut dengan alasan bahwa keberadaan Orang Asli Papua sebagai pemilik tanah mestinya dihargai oleh para migran yang datang di Papua mencari penghidupan, terlebih lagi karena adanya otonomi khusus Papua yang perlu diperhatikan oleh mereka yang datang ke Papua. MUI dalam kasus ini dapat ikut

menyelesaikan lewat tim yang dikenal dengan TIM 6 dengan baik lewat negosiasi dan komunikasi dengan pihak ‘penentang’, walau sempat terjadi ketegangan dari pihak migran.

Keterlibatan MUI Papua dalam berbagai ide dan kegiatan yang melibatkan banyak elemen penting karena beberapa alasan. *Pertama*, MUI sebagai organisasi yang ibaratkan seperti rumah besar yang dihuni oleh beberapa orang, maka umat Islam adalah penghuni rumah tersebut yang berasal dari berbagai latar belakang afiliasi organisasi yang ada untuk diproteksi dari berbagai gangguan. *Kedua*, peran MUI dianggap sangat strategis untuk menyuarakan aspirasi migran dengan elemen-elemen lain di tengah keistimewaan otonomi khusus bagi Orang Asli Papua. *Ketiga*, karena MUI lebih dianggap sebagai representasi umat Islam di setiap momen, maka penguatan strategi bertahan dari tekanan terhadap eksistensi migran ikut menjadi kuat.

Jauh sebelum Majelis Ulama Indonesia (MUI), organisasi Muhammadiyah telah ada di Papua. Embrio Muhammadiyah dimulai di Merauke tahun 1926 yang dibawa oleh seorang pendakwah Tengku Bujang Selamat. Jejak-jejak pengaruh dakwah beliau dapat dilihat sewaktu memelopori pelaksanaan shalat idul fitri di lapangan terbuka, mendirikan sekolah dan masjid yang saat ini letaknya berdekatan dengan landasan Bandara Mopah, Merauke. Sampai berakhirnya perang Dunia Kedua II, perkembangan Muhammadiyah mengalami kefakuman sampai tahun 1960-an. Setelah itu, orang-orang Muhammadiyah dari luar datang ke Papua. Sampai tahun 1964, perjuangan yang cukup lama tersebut dapat berdiri secara resmi di Abepura Kabupaten Jayapura sebelum pemekaran tahun 1966 dengan status cabang Muhammadiyah yang diketuai oleh H. Ibrahim Bauw Raja Rumbati (<https://uhamka.ac.id/jejak-sejarah-500-tahun-islam-di-papua/>).

Menurut laporan Kanwil Departemen Agama Provinsi Irian Jaya (Kementerian Agama Provinsi Papua), organisasi Muhammadiyah secara resmi berdiri dan mendapatkan pengesahan struktur dari Pimpinan Pusat pada tahun 1985

(Suriyawardi, 2015). Perkembangan Muhammadiyah di Jayapura terus berlanjut di berbagai bidang pendidikan mulai dari TK sampai Perguruan Tinggi sampai akhirnya terjadi pemekaran tahun 1993 dan pemindahan ibu kota Kabupaten Jayapura ke Sentani tahun 2000. Struktur kepengurusan Muhammadiyah yang baru pun berubah ikut berpindah ke Sentani, meskipun secara resmi baru terwujud di tahun 2005.

Muhammadiyah di Papua telah berkembang sedemikian rupa yang mempunyai amal usaha di bidang pendidikan, bidang sosial seperti panti asuhan dan klinik kesehatan masyarakat. Dalam pelayanannya, amal usaha tersebut bukan ditujukan untuk menjadi Islam, tetapi semata-mata karena faktor kemanusiaan (seperti kesaksian Budi Utomo pada awal pendirian PKU di Surabaya). Ormas Islam seperti Muhammadiyah telah menjadi wadah bagi migran Muslim yang berkecimpung di dalamnya, khususnya kiprah dalam bidang pendidikan dan sosial seperti halnya pada berbagai daerah lainnya. Bukti dari kiprah organisasi ini yang bergerak dalam bidang pendidikan sejak dan sesudah pemberlakuan otonomi khusus Papua telah banyak menelurkan anak-anak asli Papua yang sukses menjadi orang penting seperti Bupati Jayapura, Mathius Awaitouw dan Walikota Jayapura Benhur Tomy Mano (<http://www.muhammadiyah.or.id/id/>). Di Kabupaten Jayapura, walau terbilang masih relatif baru, namun dapat menunjukkan hal yang dapat memberikan kontribusi kepada daerah dan peran migran kepada organisasi ini dapat dilihat dari banyaknya kegiatan dan aset yang dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Jayapura seperti pendirian TK dan Sekolah Dasar.

Seperti halnya organisasi Muhammadiyah, kehadiran NU di Papua lebih banyak diiringi dengan arus migrasi penduduk dari luar Papua. Jejak organisasi ini dimulai di Fakfak 1965-1967 dengan pengembangan sayap oleh Gerakan Pemuda Anshor dengan ketua Abdullah Killian dan Syafruddin Rumoning. Masuknya kaum migran dari Sulawesi Selatan dan Tenggara yang kemudian membangun Masjid Jami di Kota Jayapura

menandai keberadaan Islam di tempat tersebut. Kawasan masjid tersebut kemudian menjadi sentra dari pergerakan pemuda Anshor se-Papua. Dari awal berdirinya di wilayah Jayapura berkembang ke wilayah-wilayah kabupaten/kota di Papua. Bersamaan dengan pemekaran wilayah administratif Kabupaten Jayapura ke Sentani sebagai ibu kota, maka NU secara struktur pun berubah dari Kota Jayapura ke Kabupaten Jayapura 2000 dengan Ketua Hasim Utina. Kiprah NU Kabupaten Jayapura dalam masyarakat semakin banyak dengan melakukan aktifitas yang sifatnya kultural atau kebiasaan warga Nahdiyin seperti pelayanan doa, tahlil dan kegiatan dakwah berupa ceramah. Ada pula yang secara personal mendirikan pesantren dan membina TPA/TPQ serta membentuk majelis zikir.

Demikian pula Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) yang didirikan oleh Tuty Alawiyah pada tahun 1981 di Jakarta berkembang sampai ke semua wilayah di Indonesia tidak terkecuali di Papua pada tahun 1998 dengan Ketua Yuyun Nuriah. Organisasi yang beranggotakan dari kalangan perempuan ini didirikan dengan latar belakang karena kepentingan keagamaan, sosial kemasyarakatan dan penguatan sumber daya umat Islam, juga sebagai wadah umat Islam berkumpul kaum ibu untuk menguatkan syiar keislaman. Perkembangan Badan Kontak Majelis Taklim Papua, kemudian berkembang di hampir semua daerah kabupaten/kota yang banyak dirintis oleh kalangan migran. BKMT Kabupaten Jayapura berdiri setelah perpindahan dari kota Jayapura Sentani pada tahun 2005 dengan Ketua Rukiah Sulaiman, kemudian juga berkembang dengan banyaknya majelis-majelis taklim yang berdiri di setiap masjid dan mushalah melaksanakan akitifitas berupa pengajian atau kajian baik yang bersifat bulanan maupun mingguan dengan bahan materi yang telah ditentukan maupun yang bersifat insidental dari pengurus majelis taklim. Demikian pula aktifitas yang lain berupa kegiatan bakti sosial dan pengobatan gratis khusus bagi lansia yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan.

Di samping organisasi yang bersifat keagamaan, organisasi ini juga menjadi jembatan organisasi kedaerahan yang dijadikan media peneguh identitas oleh kaum migran di Papua. Sebab, migran sangat memerlukan sarana untuk berkomunikasi dan berbagi dalam wadah yang terikat dengan hubungan-hubungan kedaerahan. Komunitas-komunitas tersebut awalnya dibentuk dengan tujuan untuk memperkuat persatuan di kalangan migran pada satu daerah. Komunitas-komunitas kedaerahan tersebut yang telah terbentuk di Kabupaten Jayapura meliputi unsur etnis Sulawesi, Jawa-Madura, Sumatera, Maluku serta pulau Nusa Tenggara. Unsur kerukunan etnis migran yang relatif besar adalah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) dan Himpunan Keluarga Jawa-Madura (HKJM). Perkumpulan-perkumpulan kedaerahan tersebut tidak hanya untuk memperkuat basis keanggotaannya, melainkan juga sebagai perekat dari pilar-pilar daerah agar wadah ini tetap solid, terutama dalam menghadapi situasi yang pasang-surut di Papua.

Unsur migran Sulawesi Selatan yang tergabung dalam Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) setidaknya yang telah terdaftar berjumlah dua belas pilar. Pilar-pilar tersebut yang memperkuat basis orang-orang Bugis-Makassar di perantauan. Demikian pula yang selalu mengkoordinasikan keperluan dari warganya kepada pihak yang terkait terutama pada bidang ekonomi, politik, dan sosial keagamaan di Papua. Cara mereka menguatkan ikatan-ikatan keorganisasian, khusus yang terlibat menjadi pengurus KKSS dan unsur pilarnya yaitu dengan melakukan kegiatan berupa pertemuan seperti pengajian dan arisan. Demikian pula kegiatan sosial dalam bentuk kunjungan atau anjongsana ke lembaga pemasyarakatan yang ada di Sentani Barat serta kunjungan kepada warga yang sakit atau kedukaan sangat aktif dilakukan.

Sementara itu, pada organisasi komunitas Jawa memiliki dua puluh tiga pilar yang terhimpun dari orang-orang yang berasal dari Jawa secara umum, baik Jawa Timur, Barat dan Tengah serta komunitas yang berasal dari Yogyakarta. Penguatan

organisasi kedaerahan ini juga secara umum melakukan hal yang sama seperti yang di lakukan oleh KKSS, seperti dalam pertemuan rutin dalam bentuk pengajian bulanan serta arisan warga begitupula santunan kepada warga bila ada yang sakit atau wafat. Keberadaan dan peran wadah yang bersifat keagamaan dan kedaerahan tersebut membuktikan adanya upaya kuat kelompok migran untuk tidak hanya tinggal di Kabupaten Jayapura, tetapi juga ikut memperkuat identitas internal dalam kaitannya dengan jaminan keberlangsungan di masa mendatang.

5.3.2. Lembaga dan Yayasan Pendidikan

Pendirian lembaga pendidikan oleh komunitas migran di Papua tidak dapat dihindarkan dari keinginan generasi mereka dapat lebih maju dari mereka yang lebih awal datang ke Papua. Mereka sangat memahami perlunya mempersiapkan sumber daya manusia yang handal tanpa harus terbebani hal-hal yang tidak dianggap bukan prinsip seperti pada hal pembiayaan. Karena bagi mereka soal biaya tidak menjadi soal, tetapi bagaimana mereka dapat mendapatkan pendidikan yang berkualitas terutama dalam pendidikan keagamaan sebagai hal yang paling mendasar. Beberapa lembaga pendidikan telah berdiri sebelum adanya otonomi khusus Papua dan sebagian yang lain berdiri setelah otonomi khusus Papua. Lembaga-lembaga ini menjadi sarana menguatkan posisi migran dalam aspek sosial karena telah memberikan kontribusi yang menegaskan bahwa migran datang bukan hanya motif ekonomi, tetapi juga dengan motif-motif lain termasuk politik meskipun tidak menjadi prioritas. Data yang diperoleh dan diolah selama di lapangan menunjukkan bahwa jumlah lembaga pendidikan di Kabupaten Jayapura yang didirikan dan dikelola oleh migran sangat banyak seperti yang tergambar pada tabel berikut.

Tabel. 5.6
Lembaga Pendidikan yang Dikelola Migran Muslim
Kabupaten Jayapura

NO	LEMBAGA PENDIDIKAN	TAHUN		
		2016	2017	2018
1	YPKP SENTANI (Tingkat SD,SLTP,SLTA)	2281	2329	2621
2	YAPIS (Tingkat SD,SLTP,SLTA)	774	677	734
3	YICJ JAYAPURA (TK,SD,SLTP)	341	403	459
4	MUHAMMADIYAH (Tingkat TK,SD)	53	70	83
5	DDI SENTANI (Tingkat SD, SLTP)	378	450	378
JUMLAH		3827	3929	4275

Sumber : Diolah penulis dari berbagai sumber, 2018.

YPKP (Yayasan Pondok Karya Pembangunan)

Undang-Undang Otonomi Khusus yang memberikan keberpihakan kepada Orang Asli Papua pada aspek pembiayaan dan fasilitas pendidikan sehingga secara langsung maupun tidak langsung terdapat pembatasan akses pada migran. Oleh karena itu, mereka dituntut untuk aktif dan kreatif dalam mencari solusi yang mampu memecahkan berbagai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan akses pendidikan. Migran Muslim menyadari arti pentingnya investasi Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menyiapkan generasi yang lebih baik dari generasi. Salah satunya lahirlah Yayasan Pondok Karya Pembangunan (YPKP) Sentani yang berdiri sejak tanggal 20 Desember 1975, terletak di Distrik Sentani, ibu kota Kabupaten Jayapura oleh Sudjadi Notomiseno,

seorang migran sukarelawan guru Trikora dari Yogyakarta pada tahun 1963. Sejak tahun 1976 Yayasan ini merintis pendidikan dasar setingkat SD sampai dengan SLTA. Yayasan ini termasuk yayasan relatif lebih awal keberadaannya di wilayah Kabupaten Jayapura jauh sebelum terjadinya pemekaran wilayah antara Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura. Dilihat dari jumlah dan kapasitas peserta didiknya jauh lebih banyak dari lembaga pendidikan yang lain dengan jumlah sebanyak 2621 orang.

Pendirian YPKP Sentani berawal dari kesadaran akan penting pendidikan bagi generasi penerus bangsa yang saat kedatangan pendiri ke Papua sangat minimnya sarana dan prasarana pendidikan setelah ditinggalkan Belanda. Migran yang datang diawal-awal tahun 1970-an melihat perlunya mencetak generasi-generasi penerus bangsa yang memiliki visi dan misi bukan hanya pada IPTEK, tetapi juga memiliki IMTAQ. Bapak “H”, selaku salah seorang Pendiri Yayasan Pondok Karya Pembangunan (YPKP) mengatakan,

“ ... Program YPKP (Pendiri Yayasan Pondok Karya Pembangunan) itu adalah unggul di bidang ilmu pengetahuan umum dan unggul di bidang tsaqofah, jadi itu untuk mengembangkan Islam, tsaqofah unggul, untuk mengembangkan ilmu kehidupan unggul boleh ada peserta didik dari putra daerah ... anda dapat mengetahui sendiri bahwa semua lulusan daripada YPKP (Pendiri Yayasan Pondok Karya Pembangunan) itu yang sarjana dari YPKP bekerjasama dengan YAPIS (Yayasan Pendidikan Islam di Tanah Papua) itu semua pejabat daerah, lalu yang lulus sarjana biasa juga dipakai untuk kepentingan jabatan-jabatan di daerah, di Papua maksudnya saya.”⁵

YPKP Sentani yang telah lama berkiprah sebagai lembaga pendidikan yang mempunyai visi dan misi seperti yang dinyatakan tersebut di atas, di luar dari segala kekurangan dan

⁵ Wawancara dengan “H”, hari Rabu tanggal 15 November 2017 di Jayapura.

kelebihannya selama ini, yayasan ini telah memberikan penguatan kepada migran muslim bahwa mereka dapat memberikan kontribusi yang nyata kepada daerah Papua dengan bukti bahwa yang belajar di lingkungan pendidikan yang bernafaskan Islam ini, bukan hanya dari kalangan migran yang Islam saja, tetapi juga ada dari kalangan Orang Asli Papua yang menimbah ilmu pengetahuan di yayasan ini, bahkan beberapa pejabat daerah di Papua adalah jebolan dari YPKP Sentani. Hal ini juga menjadi alasan untuk senantiasa memperkuat lembaga-lembaga pendidikan yang dirintis oleh migran untuk menunjukkan bahwa dalam dunia pendidikan, khususnya di era otonomi khusus ini.

Keberpihakan kepada Orang Asli Papua dalam kebijakan pendidikan yang menyebabkan migran menjadi terpinggirkan dalam penerimaan bantuan pendidikan yang berujung pada dominasi, tetapi migran juga berjuang dengan caranya untuk tetap eksis, contoh adalah wujud YPKP Sentani, sehingga dalam hal ini pun sebenarnya terjadi simbiosis mutualisme. Migran sebagai penyedia jasa pendidikan dan Orang Asli Papua sebagai pemakai yang sama-sama mendapatkan keuntungan, dalam hal ini bukan hanya keuntungan yang bersifat materi semata, tetapi manfaat yang bersifat non materi yaitu hubungan antara keduanya yang saling membutuhkan satu sama lain.

YAPIS (Yayasan Pendidikan Islam)

YAPIS (Yayasan Pendidikan Islam) didirikan pada tanggal 1968. YAPIS adalah lembaga yang mengelola pendidikan-pendidikan bernafaskan Islam dari PAUD, SD, SMP, SMA/SMEA hingga Perguruan Tinggi sebanyak 156 buah (2018) Latar belakang didirikannya antara lain adanya kesadaran dari tokoh-tokoh Islam setempat, bahwa umat Islam terlihat tertinggal jauh dari agama Kristen demikian pula karena zaman Belanda soal pendidikan diserahkan kepada Zending dan Misi yang diatur dengan *Legere Onderwijs Subsidie Ordonantie* (LOSO) untuk pendidikan dasar dan *Melderbaar Onderwijs Subsidie Ordonantie*

(MOSO) untuk sekolah lanjutan. Semua sekolah pada waktu itu diurus oleh Yayasan yang didirikan oleh Zending. Umat Islam yang relatif cukup banyak belum memiliki lembaga pendidikan sendiri sehingga anak-anak mereka yang akan bersekolah terpaksa menyekolahkan ke milik yayasan Kristen.

Tokoh migran Anwar Ilmar sewaktu menjadi Bupati di Jayapura atas bantuan Salikin Soemowardadaya sebagai kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dan didukung oleh tokoh-tokoh Islam Jayapura dan sebagai ketua adalah Syamsu Suryaatmadja. Jumlah PAUD, SD, SMP, SMA/SMEA hingga perguruan cukup sebanyak 156. Semua tingkatan pendidikan tersebut tersebar di seantero tanah Papua, mulai dari Jayapura Provinsi Papua hingga dari Raja Ampat wilayah Papua Barat. Saat didirikan YAPIS pemerintah daerah hanya mengizinkan satu naungan Yayasan bagi sekolah-sekolah Islam di Papua. Oleh karena itu, sekolah-sekolah yang bernaung di bawah sekolah Muhammadiyah, sekolah-sekolah yang bernaung Al-Ma'arif NU dan lainnya. Namun kemudian Muhammadiyah menyatakan mundur dan tidak bernaung lagi dengan di bawah YAPIS.

Lembaga pendidikan yang dikelola YAPIS tidak lepas dari peran migran yang telah lama berdomisili di wilayah transmigrasi, Kertosari distrik Sentani Barat, di Besum, distrik Namblong dan di distrik Nimbokrang. Hal yang sama, seperti peran para migran yang mendirikan sekolah atau madrasah di tempat lain seperti di Manokwari Provinsi Papua Barat (Hidayati 2018; Murtadlo 2018). Alasan para migran berjuang mendirikan lembaga pendidikan yang bernaung di YAPIS karena disamping lembaga pendidikan yang didirikan oleh pemerintah yang letaknya agak jauh dari pemukiman warga, juga karena alasan emosional, anak-anak migran yang belajar di lembaga pendidikan yang bernuansa Islam tersebut dengan sendirinya akan mendapatkan materi-materi keagamaan yang dapat menambah wawasan keislaman dan materi lainnya seperti yang diajarkan di sekolah-sekolah umum.

YICJ (Yayasan Insan Cendikia Jayapura)

YICJ atau Yayasan Insan Cendekian Jayapura sebagaimana tertuang dalam Akte Notaris Dewi. IM. Duarsa SH No. 12 tanggal 19 Januari 2007 adalah sebuah yayasan yang bergerak di bidang Pendidikan, dakwah dan Sosial. Pendirian yayasan ini tidak lepas dari keinginan dan peran migran Muslim untuk ikut memberikan sumbangsih terhadap kemajuan pendidikan di Kabupaten Jayapura dan Papua secara umum. Dalam jangka waktu yang relatif tidak terlalu lama, perkembangan yayasan telah mempunyai tiga tingkatan sekolah dari tingkat TK, SD dan SMP serta dalam dekat akan berdiri tingkat SMA. Perkembangan pembangunan lembaga pendidikan di Papua bertujuan untuk memfasilitasi minimnya sarana pendidikan dan menjadi salah satu upaya untuk mengeluarkan masyarakat Jayapura dari kondisi ‘ketertinggalan’ pendidikan.

Kemampuan pihak yayasan mengembangkan sekolah dan animo masyarakat untuk menyekolahkan putera-putrinya tidak lepas dari kekhususannya sebagai sekolah yang berciri “Islam Terpadu” yang membedakan dari sistem pengelolaan pendidikan yang lain. Islam terpadu yang dimaksud adalah model pengintegrasian kurikulum antara pendidikan umum dan pendidikan agama dalam satu jalinan dengan metode pembelajaran yang mengoptimalkan pada aspek kognitif, afektif dan psikomotorik dengan metode pelibatan lingkungan dan partisipasi secara aktif baik pihak sekolah, orang tua di rumah dan masyarakat dalam penyelenggaraan sekolah. Pemberian waktu yang banyak bagi anak-anak untuk belajar tentang karakter hidup, menghargai orang lain, bahkan sebelum masuk belajar di dalam kelas, ada waktu untuk hapalan quran surat-surat pendek bagi tingkat TK dan SD sementara bagi tingkat SMP, ada target hapalan dalam sekian Juz untuk dihapalkan sebelum tamat dari tingkat pendidikan tersebut termasuk pemberian makanan yang bergizi pada waktu jeda istirahat merupakan bagian dari kekhususan sekolah.

DDI (Darul Dakwah Wal-Irsyad)

Darud Dakwah Wal-Irsyad adalah organisasi keagamaan yang bergerak dalam bidang dakwah, pendidikan dan sosial yang berdiri pada tahun 1947 di Sulawesi Selatan hasil musyawarah mufakat pengintegrasian MAI atau madrasah Arabiyah Islamiyah oleh para alim ulama. DDI telah menyebar ke berbagai termasuk Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Jambi, Riau, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara, Jakarta, Bali, dan Papua. Sebagaimana dengan organisasi yang lainnya DDI mempunyai bidang garapan dalam mengembang visi dan misi organisasi pada bidang pendidikan, dakwah dan sosial. Pada bidang pendidikan terdapat banyak pesantren, sekolah dan madrasah sampai perguruan tinggi. Demikian pula dalam bidang dakwah, bergerak dalam kegiatan tablig, juga perbitan buku dan majalah serta media lainnya. Pada bidang sosial, DDI mengadakan kegiatan berupa gotong-royong dan kerja sama dengan berbagai pihak yang saling mendatangkan manfaat.

Perkembangan DDI sampai ke Kota Jayapura Papua pada tahun 1991/1992 dari perjalanan sejarahnya di Papua juga akhirnya sampai ke Sentani, Kabupaten Jayapura. Seperti halnya di daerah lain, di Papua juga terlihat kegiatan organisasi ini lebih terlihat menonjol dalam bidang pendidikan seperti pesantren dan madrasah. Lokasi yang ditempati DDI sebagai sentral kegiatan pendidikan adalah hasil wakaf dari seorang pengusaha migran yang sukses di Jayapura. Wakaf tersebut bagian dari penguatan masyarakat migran terhadap eksistensinya di Papua dan berkontribusi terhadap pendidikan yang sebagaimana dari awal amanat organisasi ini. DDI saat ini selain menjadi wadah menimba ilmu bagi warga Muslim, juga menjadi sarana silaturahmi antar migran melalui berbagai aktivitas sosial keagamaan yang dilaksanakan secara rutin seperti pengajian-pengajian.

Keberadaan lembaga sosial dan pendidikan seperti yang telah diuraikan di atas, memberikan penjelasan terhadap berbagai upaya yang dilakukan kelompok migran untuk menunjukkan

keberadaannya sekaligus kontribusinya di Kabupaten Jayapura Papua. Kemampuan tersebut juga memperlihatkan bahwa keberadaan mereka tidak hanya fokus pada pemenuhan kebutuhan kelompok Muslim, tetapi juga memberikan sesuatu yang bermanfaat terhadap kemanusiaan secara meluas. Artinya, praktek layanan pendidikan yang dilakukan semisal Muhammadiyah, YAPIS dan YPKP selama ini bukan hanya untuk kalangan migran yang muslim saja, tetapi bagi siapa saja termasuk Orang Asli Papua banyak yang belajar menimbah ilmu pengetahuan di sekolah tersebut dan telah banyak yang menjadi pejabat di daerahnya masing-masing seperti setingkat Walikota dan Bupati dan pejabat di birokrasi pemerintahan. Semangat pengabdian dan kemanusiaan dalam bidang ini disemangati dari spirit keagamaan yang disebut dengan *Islam rahmatan lil alamin*.

Bagi lembaga-lembaga tersebut, semangat dakwah Islam dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan atau kebaikan yang dilakukan kepada orang lain termasuk pada penganut keyakinan yang berbeda dan ikut serta dalam pendidikan bukan bertujuan menjadikan mereka berubah menjadi penganut Muslim. Akan tetapi, hal ini sangat erat kaitannya dengan ‘distribusi’ semangat Islam yang tidak memihak hanya kepada satu kelompok tertentu. Islam adalah untuk semua, bukan hanya terbatas pada penganutnya. Dalam tradisi Muhammadiyah misalnya, semangat ini sama halnya dengan apa yang dilihat dari sejarah kesaksian Dr. Sutomo sebagai penasehat Medis Pimpinan Pimpinan Pusat Muhammadiyah (*Hoofd Bestuur*). Muhammadiyah dalam memberikan layanan kesehatan tidak harus melihat status dari mana seseorang dia berasal dan tidak harus menjadi Muslim kemudian menjadi kader atau anggota persyarikatan. Hal ini dengan tegas disebutkan dalam Azas PKU Muhammadiyah yang menjadi spirit pergerakan organisasi keislaman ini.

“Pertolongan Moehammadijah b/g. P. K. O. Itoe, boekan sekali-kali sebagai soeatoe djaring kepada manoesia oemoemnja, soepaja dapat menarik hati akan masoek

kepada agama Islam atau perserikatan Moehammadiyah, itoe tidak, akan tetapi segala pertolongannja itoe semata-mata karena memenoehi kewadjiban atas agamanja Islam terhadap segala bangsa, tidak memandang Agama. Tidak mengandoeng maksoed oentoek membela sesoeatoe kepentingan diri atau bangsanja, soepaja tetap dalam kemenangan di atas fehak bangsa jang tertolong. Atau tidak poela bermaksoed, soepaja sisengsara itoe tinggal tetap dalam pertolongannja, akan tetapi bermaksoed segala bahaja kesengsaraan dan kehinaan terhindar dari pada masing-masing diri dan bangsanja” (M. Abdoellah, secr. P. K. O. Djokja).

Penegasan di atas sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Mul Khan sebagaimana yang dikutip Budiyanto dkk (2018) bahwa "Islam itu harus berpikir produktif, harus berkarya bagi kemanusiaan. Muhammadiyah bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk kemanusiaan." Artinya, keberadaan umat Islam di mana pun ia berada tidak terkecuali masyarakat migran muslim yang ada di Papua dapat memberikan sesuatu yang lebih bermanfaat kepada orang lain, berkarya tanpa melihat kepada siapa yang harus menikmati manfaat dari hasil kreasi tersebut karena memang seperti itu semangat keberislaman yang seyogyanya dipraktekkan oleh seorang Muslim. Islam idealnya harus mampu melampaui zamannya dalam memberikan sesuatu yang mungkin bagi orang lain tidak pernah terpikirkan.

Spirit Al-Quran khususnya Surat Ali Imran Ayat 110 mengitari gagasan tersebut, bahwa organisasi seperti Muhammadiyah dan mungkin lainnya menjadi pemicu kerja nyata kemanusiaan. Kuntowijoyo (2001) mengatakan terdapat tiga hal dalam ayat tersebut yang menjadi patokan untuk kerja kemanusiaan, yaitu *takmuruna bil makruf* (menyeru kepada kebaikan), *tanhauna anil munkar* (mencegah dari kemungkaran), dan *tu'minuna billah* (beriman kepada Allah). *Takmuruna bil makruf* dimaknai sebagai bentuk humanisasi atau memperlakukan seseorang dengan semestinya sebagai bentuk penghormatan kepada kemanusiaan. Sementara itu, *tanhauna anil munkar*, dimaknai sebagai bentuk pembebasan seseorang dari kungkungan

yang mengakibatkan tidak adanya akses untuk aktualisasi diri sebagai orang yang bergelut dalam kehidupan sosial, ekonomi serta politik dan budaya. Adapun *tu'minuna billah* lebih dimaksudkan sebagai transendensi yang selalu melihat optimisme masa depan, artinya seseorang atau organisasi selalu mengarah pada nilai-nilai spiritual yang dalam dan tidak dibatasi oleh adanya sekat-sekat ruang dan waktu.

Kondisi Papua yang sangat tidak berpihak terhadap migran melahirkan kreativitas baru bagi mereka untuk menemukan jalan untuk menjamin keberlangsungan di masa mendatang. Penguatan kelembagaan informal seperti penguatan organisasi sosial keagamaan menjadi salah satu cara mendukung keberadaan migran di Kabupaten Jayapura khususnya di era Otonomi Khusus. Demikian pula, 'ekspansi' dalam dunia pendidikan dapat dipahami sebagai sebuah langkah penting dalam memberikan kemanfaatan bagi semua kalangan, tidak hanya kelompok migran. Kebutuhan terhadap pemenuhan hajat pendidikan bagi masyarakat Papua sedikit tertutupi oleh keberadaan lembaga-lembaga pendidikan swasta yang dipelopori dan dikelola oleh kelompok migran. Hal ini menegaskan kembali bahwa migran di Kabupaten Jayapura Papua, dalam istilah Shahid Vawda (2017), selain melakukan adaptasi sebagai bentuk strateginya, juga menjalankan taktik yang erat kaitannya dengan keterbukaan menjalin komunikasi dengan pihak luar dalam hal ini masyarakat Papua secara umum.

Dalam bidang sosial keagamaan, relasi yang terbangun selama ini sebenarnya juga berada dalam kontestasi antar Orang Asli Papua dan migran di ranah publik untuk menunjukkan eksistensinya. Hak keistimewaan Orang Asli Papua yang didapatkan atas legitimasi otonomi khusus, sementara migran juga harus mempertahankan eksistensi diri dengan cara adaptasi diri. Migran mampu mengembangkan nilai-nilai baru dalam kehidupannya dengan negosiasi antara menahan diri dan harga diri. Nilai-nilai baru yang dimaksudkan adalah nilai yang ada pada diri migran, ketika berinteraksi di Papua kemudian dapat menegosiasikan dirinya untuk tetap bertahan.